

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Usaha Kecil Menengah

2.1.1.1 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut (Rosadi, 2014) merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan milik orang-perseorangan. Selain itu, usaha kecil menengah menurut (Kristiyanti, 2012) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan sebesar satu milyar rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari satu milyar rupiah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Bab I Pasal I tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

menjelaskan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan beberapa definisi usaha kecil menengah diatas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil menengah adalah usaha yang dijalankan seseorang dengan ide kreatifitas yang dapat membuka lowongan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan kriteria memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2.1.1.2 Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.20 Bab IV Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. Usaha Kecil adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2. Usaha Menengah adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja menyebutkan UKM adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang. Dengan rincian kategori sebagai berikut : usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1-4 tenaga kerja, usaha kecil terdiri dari 5-19 orang, usaha

menengah terdiri dari 20-99 orang, dan usaha besar sebanyak 100 orang atau lebih (Diacahaya, 2014).

2.1.1.3 Asas Usaha Kecil dan Menengah

Asas Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, asas-asasnya adalah :

1. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi yaitu pemberdayaan UKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3. Kebersamaan

Asas kebersamaan yaitu asas yang mendorong peran seluruh UKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

5. Berkelanjutan

Asas berkelanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6. Berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan yaitu asas pemberdayaan UKM yang dilakukan dengan tahap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Kemandirian

Asas kemandirian yaitu asas pemberdayaan UKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UKM.

8. Keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan yaitu asas pemberdayaan UKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Kesatuan ekonomi nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan UKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

2.1.1.4 Tujuan Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Disamping itu tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah antara lain :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.1.5 Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM antara lain :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.1.1.6 Jenis – Jenis Perusahaan

Menurut Hidayat (2008) secara umum perusahaan (business) adalah suatu organisasi dimana sumber daya (input) seperti bahan baku, dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa (output) bagi pelanggan. Jenis – jenis perusahaan yaitu :

1. Perusahaan Manufaktur (*Manufacturing Business*) adalah perusahaan yang aktivitasnya mengubah input dasar menjadi

produk jadi atau produk setengah jadi yang dapat dijual kepada pelanggan.

2. Perusahaan Dagang (*Merchandising Business*) adalah perusahaan yang tidak memproduksi barang secara langsung tetapi membeli barang dari perusahaan lain dan menjual kembali barang tersebut kepada pelanggan.
3. Perusahaan Jasa (*Service Business*) adalah perusahaan yang menjual jasa bukan barang atau produk kepada pelanggan.

2.1.2 Pengertian SAK ETAP

Pada bulan April 2009, Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi mengakui 3 pilar standar akuntansi keuangan (Narsa dkk, 2012). Tiga pilar tersebut adalah :

1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
2. PSAK – ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
3. PSAK – Syari'ah

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities* diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2009 yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 19 Mei 2009 dan sudah efektif digunakan per 1 januari 2011.

SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (*International Financial Reporting Standards*) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah, mengingat jenis usaha di Indonesia sebagian besar berskala kecil dan menengah. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME (*Small Medium Enterprises*) dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas (Ariantini dkk, 2014)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal contohnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor, dan lembaga pemeringkat kredit (Ariantini dkk, 2014)

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan

melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP (Pradipta dan Ni Luh, 2015)

2.1.2.1 Manfaat dan Tujuan SAK ETAP

Dalam akuntansi pertanggungjawaban dalam mendirikan dan mengembangkan usaha yang dapat meyakinkan publik yaitu menyusun dan menyajikan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan UKM khususnya dalam memperoleh pembiayaan dari pihak pemerintah maupun lembaga keuangan seperti perbankan.

Tujuan diterbitkannya SAK ETAP menurut (Diacahya, 2014) untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada umumnya UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Dengan adanya SAK ETAP diharapkan UKM dapat menyusun laporan keuangannya sendiri yang relevan dan handal serta pelaku usaha memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dan kondisi ekonomi bisnis yang dikembangkannya sehingga mudah dalam mendapatkan bantuan dana.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan, 2009) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.2.2 Karakteristik SAK ETAP

Karakteristik SAK ETAP menurut Ariantini, dkk (2014) adalah :

1. *Stand alone accounting Standard* (tidak mengacu ke SAK Umum)
2. Mayoritas menggunakan *historical cost concepts*
3. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah
4. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum
 - a. Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana
 - b. Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran

- c. Pengurangan pengungkapan
5. Tidak akan berubah selama beberapa tahun

2.1.2.3 Implementasi SAK ETAP

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan sudah efektif digunakan per 1 Januari 2011. Standar ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membantu proses pengembangan usaha. Namun, penerapan SAK ETAP tidak mudah jika tidak dilakukan sosialisasi dan pemberian informasi kepada para pelaku UKM. Pemberian informasi dan sosialisasi sendiri merupakan sebuah cara atau metode untuk mengenalkan dan membantu UKM dalam mengetahui dan memahami tentang SAK ETAP (Tuti dan Dwijayanti, 2014).

Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka :

1. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP;

2. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan tersebut;
3. Mengklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
4. Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui (Mulyani, 2015)

2.1.2.4 Pengguna SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Sedangkan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika :

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas yang berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan, 2009)

2.1.3 *Technology Accepted Model (TAM)*

Menurut Anik dan Dedi (2014) *Technology accepted model (TAM)* telah terbukti menjadi model teoritis dalam membantu untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku pengguna teknologi informasi. *Technology accepted model (TAM)* merupakan kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Sedangkan menurut Simanjutak (2011) model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang beralasan dengan suatu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.

Selanjutnya Muntianah dkk. (2012) menyatakan bahwa TAM menambahkan 2 konstruk utama kedalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah persepsi kegunaan atau kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut. Persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan keduanya mempunyai pengaruh ke minat perilaku. Dalam TAM dikenal ada lima konstruk yaitu : persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), minat perilaku (*behavioral intention*), penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual technology use*) atau perilaku (*behavioral*).

2.1.4 Akuntansi Usaha Kecil Menengah

Pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah strategis untuk memerangi kemiskinan dan ketergantungan masyarakat pada sektor ekonomi. Disamping keunggulan – keunggulan yang melekat pada UMKM, ada beberapa kendala yang sangat klasik seperti kesulitan dalam akses modal sehingga sulit berkembang, kesulitan akses pemasaran, pemahaman managerial yang rendah. Kendala utama yang dihadapi pihak UMKM selain modal adalah penerapan manajemen yang kurang professional. Mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang

pentingnya laporan keuangan suatu bisnis. Sistem pembukuan UMKM selama ini umumnya sangat sederhana dan cenderung mengabaikan kaidah administrasi keuangan yang standar (baku). Oleh karena itu Ikatan Akuntansi Indonesia sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) untuk UMKM yang dinamakan dengan SAK ETAP (Narsa dkk, 2012).

SAK ETAP disusun dan ditebitkan oleh IAI dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan akan dapat membantu perusahaan dalam memantau keuangan perusahaan dengan lebih relevan dan akurat. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat karena penyusunan laporan keuangan menurut SAK ETAP mencakup beberapa karakteristik kualitatif yang ada pada laporan keuangan (Alfitri, dkk, 2014).

Dengan adanya SAK ETAP, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK Umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks (Pratama, 2014).

2.1.5 Kemudahan Penggunaan SAK ETAP

Pesepsi kemudahan penggunaan SAK ETAP menurut Pradipta dan Ni Luh (2015) yaitu para pelaku usaha UKM percaya bahwa dengan penggunaan SAK ETAP mudah untuk dipahami. Persepsi kemudahan penggunaan akan mengurangi usaha (baik waktu maupun tenaga) para pelaku usaha dalam mempelajari catatan laporan keuangan melalui SAK ETAP. Artinya, apabila SAK ETAP dipersepsikan mudah untuk digunakan oleh para pelaku maka sistem tersebut akan sering digunakan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh *user*.

Laksana, dkk (2015) mengungkapkan kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tidak memerlukan suatu usaha yang besar, artinya mudah untuk digunakan. Persepsi kemudahan penggunaan dalam penelitiannya menjadi faktor utama dalam mempengaruhi minat user dalam menggunakan teknologi tersebut.

Sedangkan menurut Fithakurrahmah (2013) melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa standar akuntansi tersebut lebih mudah dipahami dan digunakan karena adanya penyederhanaan serta penyesuaian dalam beberapa standar penyajian laporan keuangan. Sehingga dengan adanya SAK ETAP maka pengaruhnya terhadap BPR adalah adanya peningkatan efektifitas dan kualitas laporan keuangan, meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pelaporan keuangan serta meningkatkan

daya saing BPR. Sehingga penelitian menunjukkan bahwa BPR menerima adanya SAK ETAP karena dianggap lebih mudah untuk digunakan.

2.1.6 Kebermanfaatan SAK ETAP

Kemanfaatan (*usefulness*) didefinisikan oleh (Adi dkk, 2016) sebagai suatu tindakan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan komputer dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Sementara itu kegunaan (kebermanfaatan) menurut Davis (1989) “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance*” yang berarti sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan prestasi kerjanya. SAK ETAP bertujuan memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membuat laporan keuangannya sendiri dan membantu dalam menyajikan laporan yang relevan dan handal.

Menurut Fithakurrahmah (2013) sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Menurut Martani (Ariantini, 2014) dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana dalam pengembangan usahanya.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal. Melihat pentingnya dari segi kegunaan, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan pemahaman yang sama oleh para penggunanya (Pratiwi dkk, 2014).

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif (Yuliani dkk, 2010).

2.1.7.1 Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Chiri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan disebut sebagai karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan

keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009) diantaranya sebagai berikut :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal, informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan

biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan juga kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan

dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi biaya dan manfaat, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.1.7.2 Posisi Keuangan

Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur-unsur

menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009) adalah sebagai berikut :

1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset. Beberapa aset, misalnya aset tetap memiliki bentuk fisik. Namun demikian bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Beberapa aset adalah tidak berwujud. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik tidak esensial. Misalnya, properti yang diperoleh melalui sewa adalah aset jika entitas menegndalikan manfaat yang diharapkan mengalir dari properti tersebut.

2. Kewajiban

Karakteristik esensial dari kewajiban adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau

peraturan perundangan. Kewajiban konstruksif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika :

a. Oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan

b. Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai sumber referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kegunaan Pada Implementasi SAK ETAP (Studi Empiris Pada UKM Di Denpasar Utara) (2015)	Variabel Independen : persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan Variabel Dependen : Implementasi SAK ETAP	1. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara positif terhadap implementasi SAK ETAP. 2. Persepsi kegunaan berpengaruh secara positif terhadap implementasi SAK ETAP.
2	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Persepsi Kegunaan Terhadap Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Malang Raya. (2013)	Variabel Independen : persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan. Variabel Dependen : Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan metode analisis Regresi Berganda, kedua variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik oleh Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya. 2. Persepsi kemudahan penggunaan (<i>perceived ease of use</i>) (X_1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP (Y) oleh Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya. 3. Persepsi kegunaan (<i>perceived usefulness</i>) (X_2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

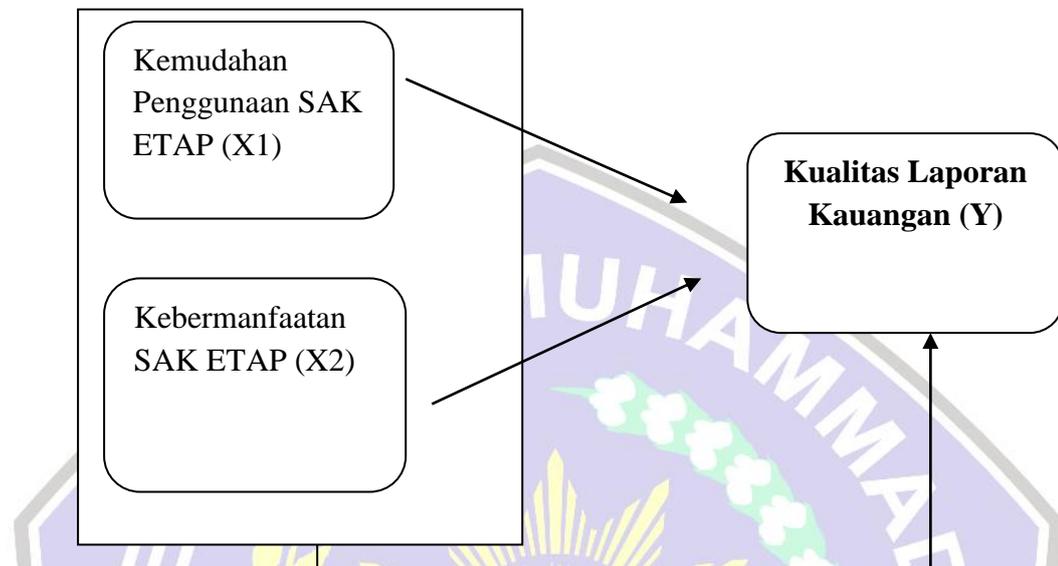
3	<p>Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Kebermanfaatan SAK ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo) (2015)</p>	<p>Variabel Independen : kemudahan penggunaan, kebermanfaatan</p> <p>Variabel Dependen : kualitas laporan keuangan</p>	<p>penggunaan SAK ETAP (Y) oleh Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan penggunaan SAK ETAP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo. 2. Kebermanfaatan SAK ETAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo. 3. Kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan SAK ETAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo.
4	<p>Analisis Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Dan Efektivitas Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus Pada Kelompok Perajin Kuningan di Kecamatan Juwana Tahun 2011) (2014)</p>	<p>Variabel Independen : Bentuk-bentuk laporan keuangan, Efektivitas laporan keuangan</p> <p>Variabel Dependen : Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk penyajian laporan keuangan. Semua UMKM kelompok pengrajin kuningan di kecamatan Juwana telah membuat laporan keuangan tetapi bentuknya tidak sesuai SAK. 2. Efektivitas bentuk penyajian laporan keuangan. Dari 10 UMKM yang membuat laporan sesuai dengan SAK hanya 4 UMKM saja, sementara 6 UMKM lain membuat laporan keuangan tetapi bentuknya tidak sesuai dengan SAK atau membuat laporan bisnis saja. Untuk pelaku UMKM sudah efektif tetapi untuk pihak ekstern tidak efektif .

5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP (2014)	<p>Variabel Independen : Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM</p> <p>Variabel Dependen : Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP</p>	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hanya lama usaha yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sedangkan latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel independen lain seperti pemberian informasi dan sosialisasi serta ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Selain itu, ukuran usaha juga tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3.1
Model Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen yang pertama yaitu kemudahan penggunaan SAK ETAP dan variabel yang kedua yaitu kebermanfaatan SAK ETAP terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Dari beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan variabel yang pertama yaitu kemudahan penggunaan SAK ETAP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan variabel kedua kebermanfaatan SAK ETAP mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti

kualitas suatu laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh penggunaan dan manfaat dalam menggunakan SAK ETAP.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan. Dengan hipotesis tersebut suatu masalah sudah dapat dijawab, namun jawaban tersebut masih bersifat teoritik dan bersifat sementara. Oleh sebab itu, diperlukan data lapangan untuk memastikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Kebenaran hipotesis tergantung pada analisis data lapangan. Hipotesis yang diajukan dapat diterima kebenarannya jika analisis data lapangan sesuai dengan teori, sebaliknya jika analisis data lapangan bertolak belakang (berbeda) dengan teori, maka hipotesis yang diajukan dapat ditolak. (Santoso, 2015)

2.4.1 Pengaruh kemudahan penggunaan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan

Perumusan hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diksani, dkk (2014) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Cabang Utama Bank Central Asia di Singaraja. Dengan ini, meskipun usaha menurut setiap orang berbeda tetapi pada

umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna.

Penelitian yang dilakukan Laksana, dkk (2015) persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *mobile banking*. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dalam menggunakan *Internet Banking* mempengaruhi seseorang untuk memiliki minat ulang untuk menggunakannya. Hal ini didasari atas efisiensi waktu yang dirasakan, kemampuan melakukan transaksi, kemudahan operasional *internet banking* dan fleksibilitas yang dirasakan ketika menggunakannya.

Adapun penelitian yang dilakukan Pradipta dan Ni Luh (2015) persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi SAK ETAP pada UKM di Kecamatan Denpasar Utara. Artinya semakin mudah penggunaan SAK ETAP dalam membantu penyusunan laporan keuangan maka keinginan untuk mengimplementasikan SAK ETAP semakin tinggi.

Fitakhurrokhmah (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) (X_1) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP (Y) pada Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya. Adanya SAK ETAP maka pengaruhnya terhadap BPR adalah adanya peningkatan efektifitas dan

kualitas laporan keuangan, meminimalisir adanya kesalahan dalam proses pelaporan keuangan serta meningkatkan daya saing BPR.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah :

Ho1 : Kemudahan penggunaan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha1 : Kemudahan penggunaan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.4.2 Pengaruh kebermanfaatan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan

Tirtana dan Shinta (2014) mengatakan persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan *Mobile banking*. Penggunaan *Mobile banking* akan meningkatkan produktivitas dan kinerja nasabah apabila nasabah tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap aplikasi *Mobile Banking*. Nasabah percaya bahwa mereka dapat mengembangkan kinerja, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efektivitas ketika menggunakan *Mobile banking*.

Pradipta dan Ni Luh (2015) persepsi kegunaan atau kebermanfaatan berpengaruh secara positif terhadap implementasi SAK ETAP. Artinya semakin bergunannya SAK ETAP dalam

membantu penyusunan laporan keuangan, maka keinginan untuk mengimplementasi SAK ETAP semakin tinggi. Dan penelitian yang dilakukan.

Fitakhurrokhmah (2013) persepsi kegunaan atau kebermanfaatan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP oleh Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya. Persepsi kegunaan terhadap penjelasan SAK ETAP mengenai unsure-unsur pengakuan pendapatan dan beban, pengukuran aset, kewajiban dan beban, penyajian laporan keuangan dan pengungkapan aset dan kewajiban memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP sehingga dapat meningkatkan kualitas dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan Mulyani (2015) dalam penelitiannya kebermanfaatan SAK ETAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo. Berdasarkan persepsi responden atas variabel kebermanfaatan SAK ETAP mampu mendukung proses aktivitas transaksi sehingga menentukan jalannya organisasi, kesamaan persepsi dalam mengakui, mencatat, dan melaporkan transaksi, hasil laporan lebih andal yang nantinya di pertanggungjawabkan kepada pihak INDAGKOP dan anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah :

Ho2 : Kebermanfaatan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha2 : Kebermanfaatan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.4.3 Pengaruh kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan oleh Fitakhurrokhmah (2013) menggunakan metode analisis berganda, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebermanfaatan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP oleh Bank Perkreditan Rakyat di Malang Raya.

Mulyani (2015) variabel kemudahan penggunaan dan variabel kebermanfaatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Wanita Kecamatan Ponorogo. Para pengurus KOPWAN kecamatan Ponorogo sangat merespon akan adanya perubahan terutama dalam hal perkembangan koperasinya masing-masing. Dibuktikan dengan adanya jawaban dari responden yang sangat antusias menanggapi berbagai perubahan khususnya standar laporan keuangan.

Diksani, dkk (2014) persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Hal ini berarti suatu sistem informasi harus mudah digunakan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap menyulitkan atau dengan kata lain suatu sistem akan mudah diterima oleh pengguna apabila sistem tersebut mudah untuk digunakan. Sedangkan untuk persepsi kegunaan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan sistem informasi akuntansi. Hal ini berarti jika seseorang merasa yakin bahwa suatu sistem berguna maka dia akan menggunakannya, dan sebaliknya jika seseorang merasa bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah :

Ho3 : Kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Ha3 : Kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan